

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DAN
LIASON OFFICER UNTUK PERUSAHAAN
FASILITAS KAWASAN BERIKAT**



Oleh:

NAMA : MAIKEL WAWOH

NIM : 2002190019

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**

VISI & MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas Unggul dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/international yang saling menguntungkan, dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maikel Wawoh

NIM : 2002190019

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tesis yang berjudul " Perlindungan Hukum bagi Pengusaha dan Liason Officer untuk perusahaan Fasilitas Kawasan Berikat" adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.
2. Bukan duplikasi karya tulis yang sudah diduplikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di universitas lain, kecuali pada bagian – bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan atau jurnal acuan yang tertera didlam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulisnya di anggap batal.

Jakarta, 28 Juli 2022



Maikel Wawoh



HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

Nama : Maikel Wawoh

NIM : 2002190019

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DAN LIASON OFFICER UNTUK
PERUSAHAAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., MH

Pembimbing II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,MH

Program Studi Magister Hukum

Ketua

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., MH

Program Pasca Sarjana

Direktur



Dr. Bintang R. Simbolon, Msi,



PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 juli 2022, telah diselenggarakan siding Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada program studi Hukum Program Pascasarjana,

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Maikel Wawoh
NIM : 2002190019
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Ujian tugas Akhir yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DAN LIASON OFFICER UNTUK
PERUSAHAAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal 28 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., MH

Pembimbing II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., MH

Anggota Penguji

Dr. Andrew Betlehn, S.H, S. Kom., MM., MH



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maikel Wawoh
NIM : 2002190019
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum bagi Pengusaha dan Liason Officer untuk
Persusahaan Fasilitas Kawasan Berikat

Menyatakan Bahwa :

1. Tesis tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tesis tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademisi yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022

Yang menyatakan



Maikel Wawoh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tesis ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada-Nya, bahkan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan Allah maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulisan Tesis ini merupakan persyaratan untuk mencapai derajat Magister (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai tentang Tempat Penimbunan Berikat khususnya Fasilitas Kawasan Berikat.

Penulis juga menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan penulisan tesis ini dimasa akan datang. Akhir kata semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Gindo L. Tobing, S.H., MH Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu meberikan bimbingan dan pengarahan.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., MH Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak Dr. Andrew Betlem, S. Kom, MM,
5. Kepada seluruh Dosen Pasca Sarjana Program Magister Huku, Fakultas Hukum dan Seluruh Staff Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia.
6. Kepada Istri tercinta yang telah memberikan dukungan, doa serta meyemangati dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis sampai selesai saat ini.

7. Kepada anak-anak tersayang yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis.
8. Kepada orangtua dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis.
9. Kepada General Direktur PT. Framas Indonesia Mr. Humberto Van Dijk, yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan Tesis.
10. Kepada teman-teman Angkatan 2019 yang telah menyemangati dan memberikan dukungan sampai selesainya tesis ini.
11. Kepada Bapak Pendeta dan semua jemaat yang selalu mendoakan penulis.
12. Kepada semua teman-teman dikantor yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis.
13. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kasubdit Fasilitas dan Kepala Seksi Fasilitas.
14. Kepada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type Madya A Bekasi

Akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang kurang sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan ini dimasa yang akan mendatang, semoga Tuhan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak, Amin.

Jakarta, 28 Juli 2022

Penulis

Maikel Wawoh

DAFTAR ISI

VISI & MISI	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
1. Tujuan Penelitian.....	23
D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	24
1. Teori Sistem Hukum	24
4. Kerangka Konsep	25
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	30
A. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	30
B. Pengawasan Barang	34
C. Fasilitas “Kawasan-Berikat”	39
1. Kemudahan Dokumentasi dan atau barang	41
2. Memperbesar <i>working capital</i> dan berkurangnya <i>opportunity cost</i>	41
3. Penghematan “Efisiensi”	42
4. Kebebasan di fasilitas PDKB dalam proses mengeluarkan barang PDKB memiliki kebebasan dalam pengiriman barang dagangan yang telah ditangani ditentukan untuk menuju TLDDP (Tempat Lain Di Luar Daerah Pabean) dan harus dimungkinkan menggunakan Dokumen BC 2.5 PIB (Pemberitahuan Barang	

Import), yaitu sesuai dengan tatalaksana kepabeanan di bidang import dengan adanya realisasi ekspor dan pengiriman ke PDKB lain.	42
D. Kepabeanan	42
1. Tujuan Pembentukan “Kawasan-Berikat”	49
2. Pengawasan Kawasan Berikat	55
BAB III	65
A. Pengawasan dalam Registrasi Importir	65
1. Masalah eksistensi	67
2. Masalah pengurus dan penanggung jawab	67
3. Masalah jenis usaha	67
4. Masalah pembukuan	68
5. Masalah nilai (<i>passing grade</i>)	68
- Pengawasan Pabean dalam Mekanisme Arus Pengeluaran Barang Import	70
1. Pemeriksaan administrasi	73
2. Ketentuan dalam penetapan jalur.	73
3. Pemeriksaan Sebenarnya	75
4. Pengaturan dan pengawasan Import barang di Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.....	78
BAB IV	84
PERANAN LAISON OFFICER DI PERUSAHAAN DALAM MENJALANKAN KEWENAGAN ATURAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANG KEPABEANAN TERHADAP PERUSAHAAN KAWASAN-BERIKAT	84
A. Pengertian Desain Kepabeanan.....	84
1. Kewajiban, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	87
2. Kekuatan Pemaksaan.....	92
3. Otoritas penagihan.....	92
4. Kewenangan untuk melaksanakan fungsi	92
5. Kewenangan karena jabatan (<i>ex officio</i>).....	92
B. Peran “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” Pada Hukum Kepabeanan Terhadap Wilayah Berikat.....	93
1. <i>Fasilitator Trade</i>	95

2. <i>Industrial Assintance</i>	95
3. <i>Collector Revenue</i>	95
4. <i>Protector Community</i>	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101



ABSTRAK

- A. Nama : Maikel Wawoh
B. NIM : 2002190019
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha dan *Liason Officer* Untuk
Perusahaan Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas Kawasan Berikat sangatlah penting oleh karena ini adalah fasilitas terbaik yang ada dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dimana Pemerintah memberikan Fasilitas Fiskal dan Perpajakan bagi pelaku usaha atau Investor Asing maupun Lokal untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan agar dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran, serta untuk memberikan daya saing kepada negara-negara tetangga yang juga sudah memberikan fasilitas di berbagai bidang demi menarik Investasi. Penulisan Tesis ini untuk memahami tata laksana Kepabeanan di bidang Fasilitas Import dengan penangguhan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Import (PDRI) untuk tujuan ekspor sehingga Negara mendapatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan pengusaha mendapatkan fasilitas penangguhan dan pembebasan Pajak. Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini disebut juga metode penelitian doctrinal, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – Undangan atau hukum positif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu, Pertama, Perlindungan hukum bagi *Liason Officer* penting, karena yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan untuk membangun, memelihara hubungan dan saling menguntungkan, memfasilitasi komunikasi dalam kegiatan antara dua orang dan antar Lembaga atau organisasi. Kedua, Peranan *Liason Officer* dalam mengawasi pemasukan import barang ke fasilitas Kawasan Berikat, yang diatur oleh Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai serta data sekunder kepustakaan, Penulis akan memberikan gambaran dari pelanggaran yang terjadi di dalam Fasilitas Kawasan Berikat terkait dengan modus-modus penyeludupan, serta peran besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dari aktifitas pengusaha yang hanya ingin mengambil keuntungan dari Fasilitas Kawasan Berikat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengusaha, *Liason Officer*, Perusahaan Kawasan Berikat.

ABSTRACT

- a. Name : Maikel Wawoh
b. NIM : 2002190019
c. Title : *Legal Protection For Entrepreneurs And Liason Officer For Bonded Zone Facility Companies*

The Bonded Zone Facility is very important because it is the best available facility in encouraging Indonesia's economic growth, where the Government provides Fiscal and Taxation Facilities for business actors or Foreign and Local Investors to invest in Indonesia with the aim of being able to provide economic impact to the community to create fields. work in reducing unemployment, as well as to provide competitiveness to neighboring countries which have also provided facilities in various fields to attract investment. the writing of this thesis is to understand Customs management in the field of Import Facilities with the suspension of Import Duties and Taxes in the Context of Import for export purposes so that the State gets Export Proceeds and entrepreneurs get tax deferral and exemption facilities.,In writing this thesis, the author uses qualitative field research methods and for data the author uses the Customs Law, Government Regulation, Ministry of Finance Regulation, Regulation of the Director General of Customs and Excise as well as secondary literature data., The author will provide an overview of the violations that occurred in the Bonded Zone Facilities related to smuggling modes, as well as the big role of the Directorate General of Customs and Excise in supervising and preventing the activities of entrepreneurs who only want to take advantage of Bonded Zone Facilities.

Keywords: Legal Protection, Entrepreneur, Liason Officer, Regional Bonded Zone Company.